

Nomor : 30/PM.02.02 /K.JI-34/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik

Malang, 30 Juni 2025

Kepada Yth.
Partai Politik Tingkat Kota Malang
(daftar terlampir)

di –
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 tentang Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025.

B. ISI IMBAUAN

Bahwa dalam rangka memastikan proses Pemutakhiran Data Partai Politik sebagaimana Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi,

dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang menyampaikan Imbauan sebagaimana berikut ini:

1. Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan;
2. Proses Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat;
3. Memastikan Partai Politik dalam Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan meliputi:
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
 - b. Keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
 - c. Keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
4. Proses Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan pada hari Kamis dan Jum'at dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - d. Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



MOCHAMAD ARIFUDIN

DAFTAR PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA MALANG

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA
5.	PARTAI NASDEM
6.	PARTAI BURUH
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
11.	PARTAI AMANAT NASIONAL
12.	PARTAI BULAN BINTANG
13.	PARTAI DEMOKRASI
14.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
15.	PARTAI PERINDO
16.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
17.	PARTAI UMMAT